

Nomor : 13096/D.3/07/2021 01 Juli 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rapat Koordinasi Nasional UKPBJ Kementerian/Lembaga Tahun 2021 (Rakornas UKPBJ K/L Tahun 2021)

Yth. Para Undangan
(daftar undangan)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah untuk:

1. membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) struktural yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa, UKPBJ melaksanakan peningkatan kapabilitasnya melalui model kematangan UKPBJ. Mengacu pada pada Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang UKPBJ bahwa pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa dapat dicapai oleh UKPBJ dalam hal telah mencapai tingkat kematangan paling kurang Proaktif (level 3).
2. memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) sebagai Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil) dan Pejabat Pengadaan (PP) yang berkedudukan di UKPBJ.

Berdasarkan data yang kami miliki, sampai saat ini masih terdapat Kementerian/Lembaga yang belum membentuk UKPBJ, belum melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ untuk mencapai tingkat kematangan Proaktif dan belum memiliki PPBJ yang memadai untuk ditugaskan sebagai Pokmil dan/atau PP.

Memperhatikan hal tersebut, LKPP bermaksud akan mengadakan Rapat Koordinasi Nasional UKPBJ Kementerian/Lembaga Tahun 2021 (Rakornas UKPBJ K/L Tahun 2021). Tema Rakornas tersebut adalah : "Percepatan Pencapaian Tingkat Kematangan Proaktif dan Pemenuhan JF PPBJ pada UKPBJ Kementerian/Lembaga dalam rangka Meningkatkan Kualitas dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". Dalam kegiatan ini akan disampaikan regulasi terbaru terkait Kelembagaan UKPBJ dan SDM PBJ dalam rangka percepatan pencapaian tingkat kematangan Proaktif dan pemenuhan PPBJ pada UKPBJ.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami mohon Saudara untuk dapat hadir dan menugaskan :

- 4 orang dari UKPBJ,
- 1 orang dari unit kerja yang membidangi organisasi dan tata laksana,
- 1 orang dari unit kerja yang membidangi kepegawaian, dan
- 1 orang dari unit kerja yang membidangi hukum

untuk menghadiri acara Rakornas UKPBJ KL Tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa - Rabu, 6 - 7 Juli 2021
Waktu : 08:00 - 16:00 WIB
Tempat : Online
Agenda : Terlampir
Link Rapat : <https://bit.ly/3d64npt>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : HSD2vq
Nomor Tiket : SK202107010001

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat menghubungi Sdri. **Inggarrestu Pradiptaningtyas (081329646392)** atau Sdri. **Verawaty Simorangkir (08161479849)**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Sutan Suangkupon Lubis

Tembusan :

1. Kepala LKPP
2. Sekretaris Utama LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : HSD2vq
Nomor Tiket : SK202107010001

Lampiran I

DAFTAR UNDANGAN

RAPAT KOORDINASI NASIONAL UKPBJ KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2021 (RAKORNAS UKPBJ K/L TAHUN 2021)

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
19. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional



28. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
29. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
30. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
31. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
33. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
34. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
35. Sekretaris Utama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
36. Assisten Logistik POLRI
37. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung
38. Sekretaris Jenderal Badan Riset dan Inovasi Nasional
39. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
40. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
41. Sekretaris Utama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
42. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
43. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
44. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan
45. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
46. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
47. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
48. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
49. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
50. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet
51. Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
52. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
53. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
54. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Negara
55. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
56. Sekretaris Utama Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia
57. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
58. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
59. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
60. Sekretaris Mahkamah Agung

61. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
62. Sekretaris Jenderal Ombudsman
63. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu
64. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
65. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
66. Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
67. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
68. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
69. Sekretaris Utama Badan Restorasi Gambut
70. Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
71. Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan
72. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
73. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
74. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
75. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
76. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
77. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
78. Sekretaris Utama Badan Standarisasi Nasional
79. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
80. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
81. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut

Lampiran II

SUSUNAN ACARA
RAPAT KOORDINASI NASIONAL UKPBJ KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2021
(RAKORNAS UKPBJ K/L TAHUN 2021)

Tema:

“Percepatan Pencapaian Tingkat Kematangan Proaktif dan Pemenuhan PPBJ pada UKPBJ Kementerian/Lembaga dalam rangka Meningkatkan Kualitas dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Hari Pertama: Selasa, 6 Juli 2021

| Waktu | Acara | Pelaksana |
|---------------|---|---|
| 07.30 – 08.30 | Registrasi Peserta | Panitia dan Peserta |
| 08.30 – 08.35 | Pembukaan | MC |
| 08.35 – 08.40 | Menyanyikan Lagu Indonesia Raya | Dirigen |
| 08.40 – 08.45 | Pembacaan Doa | Panitia |
| 08.45 – 08.50 | Laporan Pelaksanaan Acara | Koordinator Bidang Standar Kompetensi dan Kelembagaan pada Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP |
| 08.50 – 09.10 | Pembukaan dan Kata Sambutan | Kepala LKPP |
| 09.10 – 09.20 | <i>Photo Session (dokumentasi)</i> | MC |
| 09.20 – 09.40 | Kebijakan Akselerasi Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ dan Pemenuhan JF PPBJ | Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP |
| 09.40 – 10.00 | Pemenuhan JF PPBJ dan Kematangan UKPBJ dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik | Sekretaris Utama LKPP |
| 10.00 – 12.30 | Diskusi Panel: 1. Kebijakan pembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga 2. Sosialisasi Peraturan LKPP No 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, serta reviu | Narasumber: 1. Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PAN-RB |

| Waktu | Acara | Pelaksana |
|---------------|--|---|
| | <p>kelembagaan & tingkat kematangan UKPBJ di Kementerian/Lembaga</p> <p>3. <i>Sharing Session</i> : kelembagaan UKPBJ di Kementerian Dikbudristek (struktur kelembagaan UKPBJ struktural dengan penyetaraan jabatan, pembentukan satuan pelaksana, dan pengelolaan JF PPBJ dalam UKPBJ)</p> <p>4. Diskusi dan Tanya Jawab</p> | <p>2. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, LKPP</p> <p>3. Kepala Biro Umum & PBJ Kementerian Dikbudristek</p> <p>Moderator: LKPP</p> |
| 12.30 - 13.30 | <i>Istirahat, Sholat dan Makan Siang</i> | |
| 13.30 – 15.30 | <p>Paparan:</p> <p>1. Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik di UKPBJ dan Standarisasi LPSE dalam rangka pemenuhan bukti dukung tingkat kematangan UKPBJ</p> <p>2. <i>Sharing Session</i> : fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pada UKPBJ Kementerian Keuangan (proses integrasi, manfaat dan tantangan)</p> <p>3. Diskusi dan Tanya Jawab</p> | <p>Narasumber:</p> <p>1. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, LKPP</p> <p>2. Kepala Biro BMN & PBJ Kementerian Keuangan</p> <p>Moderator: LKPP</p> |
| 15.30 – 15.45 | Penutup | Panitia |

Hari Kedua: Rabu, 7 Juli 2021

| Waktu | Acara | Pelaksana |
|---------------|---|---|
| 08.30 - 09.00 | Registrasi Peserta | Panitia dan Peserta |
| 09.00 - 09.10 | Pembukaan Acara | MC |
| 09.10 - 11.00 | Diskusi Panel: 1. Materi 1 : Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang SDM PBJ 2. Materi 2 : Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Renaksi PPBJ 3. Materi 3 : Keputusan Deputi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan dalam JF PPBJ melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain | Narasumber: Tim SDM Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, LKPP Moderator: LKPP |
| 11.00 - 12.00 | Diskusi dan Tanya Jawab | Seluruh Peserta dan Narasumber |
| 12.00 - 13.00 | <i>Istirahat, Sholat dan Makan Siang</i> | |
| 13.00 - 14.30 | Paparan: 1. Materi 1 : Penjelasan Portofolio Uji Kompetensi Perpindahan Dari Jabatan Lain 2. Materi 2 : Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Renaksi JF PPBJ 3. Materi 3 : Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Perpindahan Dari Jabatan Lain | Narasumber: 1. Direktorat Sertifikasi Profesi, LKPP 2. Tim SDM Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, LKPP Moderator: LKPP |
| 14.30 - 15.30 | Diskusi dan Tanya Jawab | Seluruh Peserta dan Narasumber |
| 15.30 - 15.45 | Penutup | Panitia |